

**Implementasi Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Di Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus: Program Nganter Anak Paud Dapat  
Lulus Ijazah SMA "Ternak Panda Lima")**

Maunatul Mazida Sari, Dzunuwanus Ghulam Manar, Supratiwi  
**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405  
Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

***ABSTRACT***

*This study analyzes the implementation of the education equality policy in Banjarnegara Regency through the "Ternak Panda Lima" program, which aims to address high dropout rates and improve the average years of schooling (RLS) and the Human Development Index (HDI) in the region. Using Riant Nugroho's policy implementation theory, the research evaluates the program based on five aspects: appropriate policy, implementation, target, environment, and process. Data were collected through qualitative methods, including interviews, observations, and document studies. The findings reveal several challenges such as unclear standards and targets, limited human resources, inadequate facilities, and diverse socio-economic conditions. However, successes include increased community participation and stakeholder collaboration.*

*The results indicate that policy alignment with national goals is present but lacks clarity, affecting consistency. Implementation efforts are notable but hindered by resource limitations. The program targets the correct demographic but faces barriers in reaching them consistently. Socio-economic conditions significantly impact the program's success, with better outcomes in more advantaged areas. Effective stakeholder coordination exists but is limited by bureaucratic inefficiencies. Recommendations for improving the program's effectiveness include enhancing human resources, providing adequate facilities, and adjusting policies to local socio-economic conditions. The study concludes that the success of the "Ternak Panda Lima" program is influenced by the competency of policy implementers, stakeholder collaboration, and policy understanding.*

**Keywords:** *Policy implementation, equivalency education, Banjarnegara, Ternak Panda Lima.*

## PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara yang memiliki keseluruhan penduduk dengan populasi yang tinggi di dunia, hal tersebut memberikan potensi yang besar pula akan ketersediaan sumber daya manusia. Sejalan dengan hal tersebut komitmen akan peningkatan kualitas sumber daya manusia juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang didalamnya dituliskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari 130 negara, Indonesia berada di peringkat ke 65 dalam bidang pendidikan yang bersumber dari World Economic Forum pada tahun 2017. Hal tersebut disebabkan oleh minat belajar dan juga minat literasi terhadap buku bacaan yang masih rendah yang menjadi faktor tertinggalnya kualitas pendidikan di Indonesia dari negara tetangga (Wahyudi et al, 2022). Selain itu, hadirnya wabah virus COVID-19 juga memberikan dampak buruk bagi tatanan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistika Nasional (BPS) mengungkapkan dari tahun 2021 hingga 2022, Indonesia dihadapkan dengan kondisi kenaikan tingkatan sedemikian rupa. Di tahun 2022, peningkatan tersebut semakin meningkat, terutama di tingkat SD dengan angka

0,13%, di SMP naik menjadi 1,06%, dan di SMA mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 1,38% hal ini menggambarkan terdapat 13 dari 1.000 pelajar putus sekolah.

Tingkat kesulitan dalam sektor pendidikan turut termanifestasi di Kabupaten Banjarnegara, suatu kabupaten dengan letak di Provinsi Jawa Tengah. Data dari Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa rata rata lama sekolah pada penduduk berusia 25 tahun hanya mencapai 6,84 tahun pada tahun 2022 yang artinya penduduk usia 25 tahun di Banjarnegara hanya mengenyam pendidikan sampai kelas 6 SD. Angka ini memiliki implikasi pada laju Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut. IPM di Banjarnegara tercatat masih sebesar 68,61 pada tahun 2022 dan tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan kota atau kabupaten lain di Jawa Tengah dengan rata rata IPM diangka 72,79 persen.

Melihat berbagai permasalahan pendidikan di atas, Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara membuat suatu program pendidikan kesetaraan yang tersebar di berbagai kecamatan di Banjarnegara bernama “Ternak Panda

Lima” yang merupakan akronim dari Ngranter Anak Paud Dapat Lulus Ijazah SMA. Ternak Panda Lima ini merupakan program pemberian layanan terpadu pendidikan bagi masyarakat usia diatas 24 tahun untuk menjalani pendidikan yang lebih tinggi atau setara SLTP SLTA cukup dengan mengantarkan anaknya bersekolah khususnya di PAUD. Inovasi ini muncul dari observasi yang dilakukan Dindikpora ke sekolah sekolah PAUD di Banjarnegara dan bertemu dengan banyaknya orang tua murid khususnya ibu-ibu yang mengantar anak PAUD nya dan menunggu hingga berjam jam sampai sekolah selesai. Ketika ditelusuri lebih lanjut, masih banyak wali murid yang belum menuntaskan pendidikannya atau bersekolah hanya sampai bangku SD/SMP saja. Rendahnya rata rata lama sekolah ini tentu akan berdampak secara berkelanjutan jika tidak diberi *treatment* secara tepat. Oleh karena itu, perancangan program ini ditujukan supaya dapat menyediakan kesempatan kembali bagi wali murid untuk bersekolah kembali melalui pendidikan kesetaraan.

Dengan kondisi pemerintah Banjarnegara mengupayakan perbaikan kondisi pendidikan dalam hal ini dengan membentuk suatu program pendidikan kesetaraan Ternak Panda Lima. Terdapat satu penelitian dengan topik pendidikan kesetaraan dengan judul “Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu

Jenis Pendidikan Nonformal” Kajian tersebut mencatat bahwa pemerintah dan masyarakat memberikan pendidikan yang setara melalui berbagai lembaga kemasyarakatan (Hermawan, 2012). Dapat dikatakan bahwa dalam proses pelaksanaan pendidikan kesetaraan, partisipasi masyarakat lebih besar dibandingkan dengan bentuk pendidikan lainnya.

Kemudian penelitian lain mengenai peran masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam bidang pendidikan yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Peran Masyarakat Dalam Pendidikan” menyebutkan bahwa bentuk peran masyarakat dalam bidang pendidikan salah satunya dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang optimal. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan ternyata menjadi penyebab kurang optimalnya peran masyarakat serta adanya kesenjangan sarana dan prasarana sekolah di perkotaan dan sekolah di pedesaan yang jauh dari pusat Kabupaten Banjarnegara (Suwitri dan Sefrina, 2019).

Pelaksanaan program kesetaraan pendidikan yang terdapat pada dua penelitian tersebut masih cenderung menyoroti aspek external kebijakan yang melibatkan sumber daya seperti peran masyarakat, sarana prasarana dan upaya pemahaman peserta melalui evaluasi model pembelajaran. Sedangkan dalam penelitian

(Hermawan, 2012) menyebutkan bahwa pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan oleh masyarakat memiliki dinamika juga kualitas yang berbeda-beda, karena keterampilan peserta didik, organisasi lembaga pendidikan dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi kualitas mereka yang memperoleh pendidikan kesetaraan di daerahnya.

Berdasarkan paparan dan hasil penelitian terdahulu di atas, terdapat aspek yang belum di kaji salah satunya yaitu aspek kebijakan itu sendiri dan pelaksana kebijakan sebagai faktor internal kebijakan. Selain itu, belum adanya penelitian yang mengkaji beberapa indikator yang terlibat dan berpengaruh dalam implementasi pelaksanaan kebijakan kesetaraan. Mengacu pada hal tersebut, penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk mengkaji sejauh mana aspek internal dan external dalam implementasi kebijakan ini saling berpengaruh.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat dalam hasil penelitian terdahulu masih terdapat hambatan yang ada karena persepsi masyarakat tentang pendidikan, terbatasnya anggaran pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga, serta belum adanya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang kebijakan program yang berkaitan dengan kecakapan internal maupun external Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam

menjalankan kebijakan pendidikan kesetaraan ini.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan cara-cara untuk menjelajahi dan memahami individu atau kelompok yang berasal dari permasalahan sosial dan kemanusiaan. Dalam penelitian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dengan meneliti, mengumpulkan data, mengklasifikasi data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan guna menemukan jawaban atas rumusan permasalahan yang sudah ditetapkan.

Situs penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kab. Banjarnegara karena Dindikpora merupakan lembaga yang berwenang dalam permasalahan Pendidikan di lingkup organisasi perangkat daerah. Selain itu, Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar), dan PAUD/TK juga menjadi situs pendukung penelitian ini sebagai pihak penyelenggara dan pengelola program.

Subjek penelitian adalah partisipan yang memberikan informasi untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian. Adapun subjek dalam penelitian

ini terdiri dari sumber data meliputi Kepala Bagian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Ketua atau pengelola Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) yang terlibat dalam Ternak Panda Lima, Ketua penyelenggara Kelompok Belajar (Pokjar) yang terlibat dalam Ternak Panda Lima, Masyarakat target sasaran kebijakan kesetaraan pendidikan Ternak Panda Lima.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang menunjukkan sifat atau karakteristik proses, situasi, peristiwa, dan kegiatan yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Data kualitatif diperoleh dari analisis mendalam melalui metode penelitian yang sesuai. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer yang langsung diperoleh dari wawancara dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2017) dan data sekunder yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti buku, jurnal, dokumentasi, serta situs internet yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, dokumentasi, serta gabungan/triangulasi dari berbagai teknik tersebut.

Analisis dan interpretasi data adalah proses analisis mendalam terhadap hasil yang diperoleh dari pengumpulan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan

model analisis data Miles dan Huberman (dalam Hardani, 2020) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan Kesimpulan serta verifikasi data. Kualitas data penelitian bergantung pada validitas dan reliabilitas alat pengumpul data. Data kualitatif mengandalkan kerangka teoritis untuk interpretasi dan kesimpulan, yang memungkinkan variasi dalam kedalaman dan keluasan hasil penelitian. Peneliti harus cermat dalam memilih dan menganalisis data agar hasil penelitian berkualitas tinggi dan relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Impelementasi Program Kebijakan Pendidikan Kesetaraan Ternak Panda Lima pada Tahun 2023/2024**

Inovasi ini muncul dari observasi yang dilakukan Dindikpora ke sekolah sekolah PAUD di Banjarnegara dan bertemu dengan banyaknya orang tua murid khususnya ibu-ibu yang mengantar anak PAUD nya dan menunggu hingga berjam jam sampai sekolah selesai. Ketika ditelusuri lebih lanjut, masih banyak wali murid yang belum menuntaskan pendidikannya atau bersekolah hanya sampai bangku SD/SMP saja. Oleh karena itu, perancangan program ini ditujukan supaya dapat menyediakan kesempatan kembali bagi wali murid untuk bersekolah kembali.

Dalam keberjalanan program tersebut, melihat bagaimana proses implementasi program menjadi hal yang penting. Jika implementasi kebijakan yang direncanakan tidak efisien dan kebijakan tersebut gagal menangani masalah yang memerlukan campur tangan atau bahkan menyebabkan dampak pembangunan yang buruk, maka kebijakan tersebut dianggap tidak berhasil. Maka dari itu, diperlukan penelitian akan efektivitas implementasi program Ternak Panda Lima. Dalam penelitian ini, efektivitas implementasi dikatakan sebagai konsep yang merujuk pada ketercapaian tujuan dari kegiatan implementasi yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif Program Ternak Panda Lima pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dalam meningkatkan jumlah siswa yang tinggal di sekolah rata-rata. Untuk itu, dalam menganalisis efektivitas tersebut, peneliti menggunakan konsep efektivitas kebijakan menurut Riant Nugroho (2012:107), konsep efektivitas kebijakan mencakup prinsip "lima tepat" yang harus terpenuhi dalam implementasinya.

Terdapat lima aspek atau "lima tepat" yang akan peneliti gunakan dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu tepat kebijakan, tepat

pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, serta tepat proses.

### **1. Tepat Kebijakan**

Ketepatan kebijakan adalah kebijakan yang telah di buat memuat hal- hal yang memang harus dipecahkan. Suatu kebijakan dirasa tepat jika tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dan hasilnya dapat menyelesaikan masalah yang ada, dalam Riant Nugroho (2014: 686). Indikator dari ketepatan ini adalah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, kebijakan bermuatan hal- hal yang dapat menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan, dan kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

Untuk mengukur kesesuaian kebijakan dalam implementasi program Ternak Panda Lima ini diperlukan sebuah cantolan kebijakan yang mana mengatur tentang spesifik pelaksanaan, teknik penyelenggaraan, pedoman, target, dan lainnya yang sesuai permasalahan tetapi fakta dilapangan belum ada peraturan daerah yang mengatur. Sehingga cantolan kebijakan untuk program ini masih pada Peraturan Bupati no 27 tahun 2016 terkait penuntasan wajib belajar 9

tahun pada program Ternak Panda Lima seharusnya sudah masuk dalam lingkup penuntasan wajib belajar 12 tahun dikarenakan terbuka untuk kesetaraan tingkat SLTA.

Selain pada sisi peraturan, ada beberapa dari indikator yang sudah berjalan seperti kesesuaian karakteristik lembaga. Dengan permasalahan yang fokus pada pendidikan maka solusi dan lembaga yang berwenang juga dari lembaga terkait yang membawahi aspek pendidikan dalam lingkup organisasi perangkat daerah yaitu Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.

Untuk aspek materi dan model pembelajaran yang disusun menyesuaikan keterbutuhan peserta dengan tidak hanya memberikan pembelajaran akan ilmu pengetahuan tetapi juga skill keterampilan yang bisa digunakan sebagai bekal untuk menaikkan taraf ekonomi peserta. Tetapi dalam keberjalanan pemberian variasi model pembelajaran ini masih kurang dalam hal monitoring dan evaluasi sehingga untuk menilai materi atau skill yang diberikan berhasil atau sesuai keterbutuhan peserta tidak dapat dipantau.

## **2. Tepat Pelaksanaan**

Ketepatan pelaksana adalah aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Aktor dalam implementasi kebijakan tidak hanya pemerintah melainkan terdapat lembaga lain yang dapat menjadi pelaksana, dalam Riant Nugroho (2014: 686). Indikator dalam ketepatan pelaksana ini adalah ketepatan aktor pelaksana kebijakan dan ketepatan tugas pelaksana kebijakan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi sudah terdelivery dengan baik pada masing masing instansi dan lembaga terkait. Implementator yang terlibat seperti Baperlitbang, Komisi IV DPRD, Sekda, Bupati, Dindikpora, Dindukcapil, Bapermades, Lurah/Kepala Desa, Himpaudi, PKBM serta Tim penilik non Formal sudah terbagi dengan klasifikasi tugas pokok serta fungsi tersendiri yang sudah dimiliki. Kemudian, perlunya komunikasi yang cukup dalam pelaksanaan sebuah kebijakan antar organisasi atau pihak yang berwenang. Dalam pelaksanaan program kebijakan Ternak Panda Lima, komunikasi antar pelaksana kebijakan terkait dinilai telah berjalan dengan baik. Meskipun dalam beberapa hal masih belum optimal seperti alotnya koordinasi terkait anggaran dan monitoring oleh PKBM ke setiap pokjar dengan jarak

yang jauh sehingga sulit dilakukan koordinasi dan pengawasan secara langsung. Namun, secara umum hal tersebut tidak mengganggu keberjalanan program keseluruhan.

Untuk aspek sumber daya, baik sarana prasarana, anggaran, dan ketersediaan tutor di tahun pertama program berjalan kurang optimal. Sarana prasarana yang diberikan kepada pihak PAUD/TK sebagai pokjar masih kurang dan berjalan apa adanya dengan tidak ada alat pembantu pembelajaran, maupun tempat penyimpanan berkas maupun bahan ajar yang kurang. Anggaran yang minim dari APBD dan ketersediaan tutor yang berbeda beda pada setiap pokjar memberikan beban pengajaran tersendiri.

### **3. Tepat Target**

Ketepatan target adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari target kebijakan, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah ketepatan target penerima, target dalam kondisi siap untuk di intervensi, dan intervensi target dalam implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

Indikator tepat target sudah berjalan sesuai dengan yang terjadi

di lapangan meskipun dilakukan penyesuaian pada beberapa aturan tertentu. Seperti target sasaran yang menysasar kelompok usia 25 tahun ke atas dalam pelaksanaannya penerimaan target sasaran juga diperbolehkan pada usia dibawah 25 tahun selama peserta tersebut memiliki hubungan dengan peserta didik di PAUD yang menjadi pokjar dan memiliki keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan. Dari sisi intervensi dan kondisi masyarakat sudah optimal dalam keberjalanannya, khususnya masyarakat peserta program merasa terbantu dengan program yang ada dan turut berpartisipasi aktif menyukseskan program sebagai peserta.

### **4. Tepat Lingkungan**

Ketepatan lingkungan adalah kebijakan yang telah dibuat telah sesuai dengan lingkungan kebijakan, seperti interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait, dalam Riant Nugroho (2014: 687). Indikator dalam ketepatan ini adalah keterkaitan lembaga- lembaga pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya, persepsi kelompok kepentingan akan kebijakan dan implementasi kebijakan, dan sumber otoritas kebijakan.

Konsep ketepatan lingkungan ditinjau dari lingkungan internal kebijakan dan lingkungan eksternal seperti kelompok penekan dan media massa sudah berjalan berimbang. Dalam lingkungan internal sendiri komunikasi dan koordinasi sudah baik dilakukan baik saat proses awal kebijakan maupun pada proses monitoring. Meskipun dalam keberjalannya ada kendala dalam komunikasi tetapi tidak menjadi sebagai sesuai yang menghambat sehingga masih berjalan dengan baik. Untuk kondisi eksternal kebijakan juga mendapat reaksi positif dari adanya beberapa media massa yang meliput program yang berdampak pada opini masyarakat.

## **5. Tepat Proses**

Ketepatan proses adalah kebijakan yang telah dibuat sesuai dengan proses di dalam implementasi kebijakan publik sehingga pelaksana kebijakan memahami tugas dan kelompok sasaran menerima dari kebijakan tersebut, dalam Riant Nugroho (2014: 688). Indikator dalam ketepatan ini adalah kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan dan kesiapan masyarakat dalam menjalankan kebijakan.

Sebagai indikator terakhir ketepatan proses juga sudah berjalan dengan

baik. Hal ini diindikasikan oleh bagaimana kesiapan pemahaman dari penyelenggara dan pengelola dalam menganggap Ternak Panda Lima sebagai sebuah program kebijakan yang harus dilaksanakan dan bagaimana kondisi dari masyarakat maupun pemerintah dalam menerima dampak sosial ekonomi dengan diberlakukannya program ini. Untuk pemahaman penyelenggara dan pengelola sudah tercermin dengan baik dengan adanya SOP dan MOU sedangkan untuk pemahaman dari dampak sosial ekonomi sudah baik dengan respon positif dan kelonggaraan sistem pembelajaran yang tidak mengganggu aktivitas pada umumnya..

## **KESIMPULAN**

Implementasi Program kebijakan pendidikan kesetaraan Ternak Panda Lima di Kabupaten Banjarnegara pada pelaksanaan tahun 2023/2024 masih kurang efektif berdasarkan tidak terpenuhinya kelima aspek konsep efektivitas implementasi kebijakan Riant Nugroho (2012). Dari kelima aspek, aspek tepat target sudah berjalan dengan tidak tumpang tindihnya target sasaran dengan kebijakan lain dan kondisi target siap diintervensi, aspek tepat lingkungan sudah berjalan dari terwujudnya kordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga terkait, dan aspek tepat

proses sudah berjalan baik dengan adanya pemahaman pelaksana kebijakan akan tujuan program yang tertuang dalam dokumen perjanjian kerjasama. Sedangkan dua aspek yang belum terpenuhi yaitu:

1. Tepat Kebijakan, belum adanya spesifik kebijakan peraturan yang mengatur program tersebut khususnya terkait penuntasan wajib belajar 12 tahun. Selain itu, dengan tidak adanya peraturan spesifik berdampak pada ketiadaan landasan target dan waktu untuk mengukur perkiraan program dapat mencapai tujuan penuntasan RLS dalam berapa tahun. Dari segi pembelajaran, tidak adanya feedback dari peserta kepada pihak penyelenggara terkait kesesuaian model dan materi pembelajaran sehingga untuk menilai apakah materi atau skil yang diberikan berhasil dan sesuai kebutuhan peserta atau tidak, tidak dapat dipantau
2. Tepat Pelaksanaan, terkait dengan sumber daya baik sarana prasarana, anggaran, dan ketersediaan tutor di tahun pertama program berjalan kurang optimal. Sarana prasarana yang diberikan kepada pihak PAUD/TK sebagai pokjar masih kurang dan berjalan apa adanya dengan tidak ada alat pembantu pembelajaran, maupun tempat penyimpanan berkas maupun bahan ajar yang kurang. Anggaran yang

minim dari APBD dan ketersediaan tutor yang berbeda beda pada setiap pokjar memberikan beban pengajaran tersendiri.

## **SARAN**

Adapun saran yang peneliti ajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Dalam tepat kebijakan diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hasil program secara keseluruhan. Mengingat tahapan penelitian ini baru mencapai semester kedua program berjalan, sehingga dampak dan hasil program secara menyeluruh belum dapat diidentifikasi secara utuh. Oleh karena itu, diperlukan penelitian selanjutnya dengan tujuan untuk menyusun gambaran yang komprehensif tentang pencapaian program, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau penyesuaian strategi kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan secara efektif.
2. Berkaitan dengan tepat pelaksana, kerjasama dengan swasta dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan manfaat dan kualitas layanan program.
3. Berkaitan dengan tepat target mengenai target sasaran Program Kebijakan Ternak Panda Lima pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memberikan aturan tertulis dengan lebih lengkap terkait kriteria kriteria target sasaran sehingga meskipun dalam pelaksanaannya ada kelonggaran kriteria pihak penyelenggara yaitu PKBM dan PAUD/TK sebagai Pokjar memiliki pedoman yang berlaku dalam memutuskan.

4. Berkaitan dengan tepat lingkungan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara turun berpartisipasi dalam melakukan sosialisasi pada tingkat masyarakat tidak hanya dari pihak penyelenggara, sehingga mereka lebih memahami implementasinya dan dianggap lebih mumpuni jika dihadapkan dengan pemberlakuan aturan yang ada.
5. Dalam hal ketepatan proses, saran bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara atau pelaksana kebijakan seharusnya menjembatani dan mendorong penduduk supaya lebih aktif dalam keikutsertaan dan memerankan peran dalam pelaksanaan Program Kebijakan Ternak Panda Lima

#### DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara (Metode Baru) (Persen), 2021-2023 – Harapan Lama Sekolah (Tahun)*.

Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang. (2023). *Rata-rata Lama Sekolah 2021-2023*. Semarang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang.

Hermawan, I. K. D. (2011). Kinerja Pendidikan Kesetaraan Sebagai Salah Satu Jenis Pendidikan Nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 18, Nomor 1, Maret 2012.

Creswell, J. W. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. 4th ed. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung Alfabeta.

Hardani, dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group.

Wahyudi, L. E., Mulyana, A., Dhiaz, A., Ghandari, D., Dinata, Z. P., Fitoriq, M., Hasyim, M. N. (2022). Mengukur Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Ma'arif Journal of Education, Madrasah Innovation and Aswaja studies*. Vol. 1(1) PP. 18-22.

Sefrina, G. E. & Suwitri, S. (2019). Implementasi Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 7  
Tahun 2013 tentang Peran  
Masyarakat dalam Bidang  
Pendidikan. *Jurnal Tinjauan  
Kebijakan Dan Manajemen  
Publik*, Vol. 8, Nomor 2, April  
2019.

Nugroho, R. (2012). *Public Policy*.  
Jakarta: PT. Media Komputindo.

Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Publik di  
Negara-Negara Berkembang*.  
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.